

BAB I

PENDAHULUAN

Skripsi ini menjelaskan tentang kebijakan Pemerintah Perancis yang menjabat pada saat itu untuk mendeportasi etnis Roma pada tahun 2010. Judul ini dipilih karena kebijakan Perancis ini menimbulkan protes dari Uni Eropa sebagai badan otonom yang menaungi Perancis dan Negara asal dari etnis Roma, yaitu Rumania. Dalam skripsi ini pembahasan mengarah kepada alasan atau faktor-faktor yang membuat Perancis tetap mengambil kebijakan deportasi untuk etnis Roma walaupun mendapatkan protes maupun teguran dari Uni Eropa.

A. Latar Belakang

Perancis merupakan sebuah negara yang terletak di benua Eropa dan 88.969 km² di Wilayah Seberang Lautan/DOM). Perancis yang merupakan negara terbesar di Eropa Barat ($\pm 1/5$ luas Uni Eropa) memiliki wilayah perairan yang amat luas (dengan zona ekonomi eksklusif seluas 11 juta km²). Dalam politiknya Perancis merupakan negara Eropa pertama yang menyelenggarakan sebuah pemilihan umum, dan Perancis juga merupakan negara Eropa yang pertama yang mendemonstrasikan bahwa sebuah pemilihan umum tidak menghalangi kemungkinan terjadinya pemerintahan otoritarian. Robert Michels menjelaskan "Sewaktu Napoleon I dinobatkan menjadi Raja Perancis melalui plebisit, ia menyatakan bahwa ia menganggap kekuasaannya bertumpu semata-mata pada massa. Demikian halnya dengan Napoleon III yang dalam suratnya kepada Majelis Nasional yang ditulis di London 24 Mei 1848, mengatakan bahwa Republik Perancis merupakan hasil revolusi Februari dan didasarkan pada pemilihan umum". Perancis adalah salah satu arsitek pendiri organisasi regional Uni Eropa yang termasuk salah satu *The Founding Father* atau *The Origin of Six* yakni enam negara anggota asli pendiri Uni Eropa yang ketika itu masih bernama *Coal and Steel European Community*

(Masyarakat Batubara dan Baja Eropa) pada tahun 1951, dengan adanya Perjanjian Paris (*la Nita de Pads*).¹

Sedangkan, Etnis Roma sendiri merupakan etnis minoritas yang berada di Rumania dan merupakan etnis minoritas terbesar di Eropa. Etnis ini memiliki pandangan hidup yang unik dan tersebar luas di benua Eropa, Amerika dan Timur Tengah. Dewasa ini jumlah mereka diperkirakan mencapai lebih dari 5 juta orang yang tinggal tersebar di setiap penjuru dunia. Etnis ini memiliki hubungan erat dengan india bagian utara yang pernah ada 1000 tahun lalu, kelompok ini meninggalkan india dengan alasan yang kurang jelas, namun sejumlah pakar mengatakan etnis ini meninggalkan india karena konflik militer yang tak kunjung usai. menurut catatan sejarah etnis ini memasuki Eropa yang mayoritasnya tersebar di perancis sebelum tahun 1300 Masehi melalui Persia dan Turki. Pada awal-awal kedatangan di Eropa hingga jangka waktu yang lama etnis ini cenderung tidak mau berbaur. Hal demikian bisa dimengerti mengingat latar belakang mereka dulunya hidup dalam masyarakat India yang terbagi dalam kasta. Cara hidup etnis Roma yang cenderung mengisolasi diri dan tidak mau bergaul menimbulkan kecurigaan-kecurigaan dari warga asli. Tidak hanya sebatas curiga warga asli cenderung bersikap antipati. Dalam telusur sejarah telah terjadi banyak diskriminasi dan penganiayaan terhadap Etnis ini. Mereka dikucilkan dengan cara dipaksa mendirikan kemah diluar perkampungan warga asli, dilarang menimba air di perkampungan dan dilarang masuk kampung untuk berbelanja kebutuhan hidup sehari-hari.² Hal tersebut tentu tidak lepas dari adanya *stereotype* terhadap etnis roma yang dianggap sebagai etnis pembohong dan pencuri.³

Pemilu Perancis pada tahun 2007 mengeluarkan nama

¹ Michels, Robert (1984). *Partai Politik Kecenderungan Oligarkis dalam Birokrasi*. Jakarta CV Rajawali, hal 122.

² *Diskriminasi Gipsi Sinti dan Roma di Eropa*, www.dw.com, 22 desember 2016.

³ Goldston, J. A. (2002). "Roma Rights Roma Wrong." *Foreign Affairs*, Vol. 81. No. 2, 146.

Sarkozy sebagai Presiden terpilih. Pada tahun yang sama Sarkozy menetapkan kebijakan imigrasi yang restriktif berupa undang-undang dan dikenal dengan "*Law on Immigration control, Integration and Asylum*". Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk memberantas imigrasi ilegal, membatasi masuknya serta memperketat syarat-syarat berdomisili di Perancis, poin penting yang terdapat kebijakan tersebut yaitu (1) *Immigration Choice* (penyeleksian imigran), (2) *Mandatory Immigration* (integrasi "mandat"), (3) *Co-development* (pembangunan) Pada tahun 2010 Presiden Nicholas Sarkozy mengeluarkan kebijakan mendeportasi etnis Roma dari Perancis dengan memusnahkan kamp-kamp ilegal dari etnis Roma sendiri.⁴

Dalam Hukum Internasional, deportasi atau ekstradisi adalah suatu proses di mana berdasarkan traktat atau repositas suatu negara menyerahkan kepada negara lain atas permintaannya seseorang dituduh atau dihukum karena melanggar hukum negara yang mengajukan permintaan, negara yang meminta ekstradisi memiliki kompetensi untuk mengadili tertuduh tindak pidana tersebut. Dalam definisi hukum Internasional tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa memang pendeportasian biasanya dilakukan karena seseorang melakukan pelanggaran dalam sebuah negara yang didatanginya.

Kebijakan Sarkozy mendeportasi etnis Roma menuai protes terutama dari Uni Eropa selaku organisasi yang menaungi Perancis dan Rumania selaku negara asli dari etnis Roma. Yang mana kita ketahui bahwa Rumania sendiri bergabung dengan Uni Eropa pada tahun 2007. Uni Eropa menerapkan *Free Movement of People* yang tertulis dalam Perjanjian Schengen dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian Eropa diantara orang-orang Eropa itu sendiri.

⁴ Darmawan, Indra. Warga Perancis Demo Pengusiran Kaum Gipsi - Dunia. September 5, 2010.
<http://dunia.news.viva.co.id/news/read/176110-warga-perancis-demo-pengusirankaum-gypsi> (diakses 7 Januari 2017).

Berdasarkan perjanjian tersebut, Pendeportasian terus-menerus Etnis Roma dalam jumlah yang besar yang dilakukan oleh Perancis menjadi momentum yang menyadarkan Uni Eropa tentang buruknya integrasi sosial Etnis Roma. Pendeportasian Etnis Roma dilakukan Perancis setelah bekerjasama dengan Rumania, yang dianggap sebagai daerah asal Etnis Roma sebelum bermigrasi ke Perancis.⁵ Sebenarnya, Perancis bukanlah satu-satunya negara yang mengeluarkan kebijakan deportasi Etnis Roma ke negara asal mereka. Italia juga telah melakukannya berulang kali. Sementara Jerman telah menandatangani perjanjian dengan Rumania mengenai “pengembalian” ribuan warga Etnis Roma yang tidak memiliki ijin, untuk kembali ke daerah asalnya. Dapat dikatakan bahwa integrasi sosial Etnis Roma masih sulit diterapkan oleh negara-negara anggota Uni Eropa pada saat itu. ⁶

Kebijakan pendeportasian etnis Roma oleh Perancis ini menimbulkan berbagai macam anggapan bahkan dari Uni Eropa yang menaungi Perancis dan juga Etnis Roma yang memang berwarga negara Rumania. Beberapa upaya telah dilakukan Uni Eropa sebagai sebuah organisasi besar yang menaungi Negara-negara di wilayah Eropa, diantaranya Parlemen Eropa menetapkan resolusi yang mengecam tindakan Perancis terhadap etnis Roma dan menuntut negara itu segera menghentikan pengusiran. Resolusi ditentang 245 anggota dan didukung 337 anggota parlemen dan mempromosikan integrasi sosial etnis Roma di Rumania.⁷ Terkait kaum minoritas Uni Eropa sendiri belum mempunyai kebijakan yang khusus membahas terkait kaum minoritas, namun Uni Eropa sendiri sebagai suatu organisasi yang besar sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia terutama terkait kasus yang ada di internal atau negara-negara Uni Eropa sendiri. Uni Eropa telah

⁵ Fraser, C. *France sends roma gypsies back to romania*, www.bbc.com, 10 november 2016.

⁶ *France's unwated roma*, www.bbc.com, 10 november 2016

⁷ *Parlemen Uni Eropa : Deportasi Etnis Roma Merupakan Pelanggaran HAM*, www.dw.com, 10 november 2016.

melakukan beberapa langkah untuk mempromosikan terkait etnis Roma dan meningkatkan standar hidup etnis ini sendiri, dengan cara integrasi sosial yang ditujukan kepada negara-negara anggota Uni Eropa.⁸

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari permasalahan di atas, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: **“Mengapa pemerintah Perancis tetap mengambil kebijakan mendeportasi Etnis Roma walaupun diprotes oleh Uni Eropa pada tahun 2010?”**

C. Landasan Teori

Kerangka teori sangat diperlukan dalam penulisan karya ilmiah, karena landasan teori inilah yang nantinya digunakan penulis sebagai alat analisa untuk menjawab rumusan permasalahan penelitian. Dalam prosesnya teori akan membantu dalam mengorganisasikan dan menata fakta yang diteliti. Dalam penelitian ini teori yang akan digunakan adalah teori Philippe Bourbeau yaitu Sekuritisasi migrasi, selain itu penulis juga menggunakan Teori pilihan rasional.

1. Sekuritisasi Migrasi

Philippe Bourbeau dalam teorinya menyebutkan bahwa: *“Migration Securitization theory is a theory that a portrait of the movement of a person who passed the boundary of a country and is an order system that will underlie the movement of any person. This theory seeks to combine a system of migration into a security framework or in other words how migration can be a part of the security”*⁹

Sekuritisasi Migrasi menurut Phillippe Bourbeau adalah sebuah teori yang menggambarkan tentang pergerakan

⁸ European Commission (2011). *An EU framework for national Roma integration strategies up to 2020*. Brussels: European Commission. Hal 1.

⁹ Bourbeau, P. (2011.) *The Securitization of Migration: A Study of Movement and Order*. New York: Routledge.

seseorang yang melewati tapal batas suatu negara dan merupakan suatu tatanan sistem yang mendasari akan pergerakan setiap orang tersebut. Teori ini berusaha untuk menggabungkan antara suatu sistem migrasi ke dalam sebuah kerangka kerja keamanan atau dengan kata lain menjelaskan bagaimana migrasi dapat menjadi bagian dari keamanan itu sendiri. Menurut Philippe Bourbeau, migrasi dapat tercipta secara aman jika suatu negara memiliki legal (hukum), kebijakan pemerintah, serta saliency terhadap migrasi maka migrasi tidak akan menimbulkan problem keamanan. *“in order to better understand the phenomenon of securitized migration are safe, i use three indicator; legal, policy statement, and saliency.”*¹⁰ Dari pengertian teori migrasi tersebut dapat kita lihat bahwa dinamika migrasi yang terjadi pada setiap negara selalu berkaitan dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang berasal dari sifat para imigran itu sendiri. Hal ini tidak menutup kemungkinan terjadinya ancaman atas adanya migrasi dalam suatu negara. Maka, pengamanan merupakan suatu hal yang penting guna mengendalikan arus migrasi supaya tidak terjadi hal-hal yang dapat mengganggu keamanan suatu negara. Selain itu, peran dari komunitas internasional juga penting untuk menghadapi permasalahan yang dapat timbul akibat dari migrasi dalam suatu negara. Dalam teori ini dijelaskan bagaimana migrasi dalam suatu negara dapat dikelola dengan baik, sehingga terhindar dari ancaman dan pelanggaran yang datang dari para imigran.¹¹ Dalam hal ini, keamanan merupakan salah satu alasan dari Sarkozy untuk mendeportasi etnis Roma. Dengan adanya kasus tindak kriminal atau pelanggaran-pelanggaran dari etnis Roma menjadi ancaman untuk keamanan warga Perancis sendiri, dimana sebuah negara memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan nasionalnya.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Hardi Alunaza S.D, M. Kholit Juani, *“Kebijakan Pemerintah Indonesia melalui Sekuritisasi Migrasi Pengungsi Rohingya di Aceh tahun 2012-2015”*, Universitas Tanjungpura.

2. Teori Pilihan Rasional

Dalam bukunya, Gabriel A. Almond “A Discipline Divided: Schools and Sects in Political Science” mengatakan :

*“it proceeds from assumption, or axioms, about human motives and behavior; and draws theological institution and policy implication from those axioms. One aspects of this “methodological individualism”, which argues that all social phenomena are derivable from, or can be factored into, the properties and behaviors of individuals. A second aspect is that political actors-voters, politicians, bureaucrats are assumed to be material interest maximizers, seeking benefits in the form of votes, offices, power and so on, at least cost.”*¹²

Teori rasional ini fokus pada sifat dan tingkah laku individu, suatu kebijakan diambil berdasarkan pilihan rasional ataupun pertimbangan dari elite politik. Teori pilihan rasional sebagai sebuah pendekatan yang digunakan untuk memahami bagaimana elite politik menentukan kebijakan-kebijakan politik berdasarkan pertimbangan pilihan-pilihan rasional. Pilihan rasional merujuk pada perilaku manusia sebagai makhluk ekonomi, yang bertindak karena ada motivasi insentif. Teori ini menempatkan manusia sebagai makhluk rasional. Manusia rasional akan selalu dapat membuat peringkat pilihan sehingga dengan cara itu dapat diperbandingkan kelebihan dan kekurangannya. Meskipun peringkat pilihannya tersebut dapat berubah, tetapi ia selalu memilih alternative yang peringkatnya tertinggi dari rangkaian pilihannya itu dan selalu membuat pilihan yang sama setiap kali dihadapkan pada alternative yang sama. Rasionalitas merujuk pada proses tindakan, bukan pada hasil akhir atau bahkan keberhasilan dalam mencapai suatu keinginan¹³. Dalam kasus pengambilan kebijakan oleh

¹² Gabriel A. Almond, “A Discipline Divided: Schools and Sects in Political Science”, 1990. Hal 123.

¹³ Jazilah, F. P., Susilo, D., & Eriyanti, L. D. , Kepentingan Nicolas Sarkozy Dalam Pembuatan Kebijakan Imigrasi di Perancis. Artikel

pemerintahan Sarkozy untuk mendeportasi etnis Roma tentu melaksanakan beberapa proses seperti beberapa pertimbangan untuk mengambil keputusan deportasi tersebut.

Teori Pilihan Rasional memiliki tiga elemen penting yaitu *methodological individualism*, *goal-seeking* atau *utility-maximization* dan *the existence of various institutional* atau *strategic constraints on individual choice*¹⁴. Penulis sendiri menggunakan 2 elemen pada teori ini untuk membuktikan hipotesanya yaitu elemen yang kedua yang ketiga.

Yang pertama dari elemen-elemen ini, *methodological individualism*, berarti bahwa pilihan rasional analisis individu menempatkan individu sebagai unit dasar analisis sosial. Individu tersebut merupakan seorang aktor rasional pembuat keputusan, dimana berusaha menetapkan pilihan atas alternatif-alternatif yang ada. Para pembuat itu digambarkan selalu siap untuk melakukan perubahan atau penyesuaian dalam kebijaksananya. Mereka juga diasumsikan dapat memperoleh informasi yang cukup banyak terutama dalam suatu pemerintah yang monolit, tidak terpecah belah, sehingga dapat melakukan penelusuran tuntas terhadap semua alternatif kebijaksanaan yang mungkin dilakukan dan semua sumber-sumber yang bisa dipakai untuk mencapai tujuan yang mereka tetapkan dan dilakukan dengan sengaja untuk mencapai suatu tujuan¹⁵.

Kedua, individu diasumsikan bertindak untuk dapat memaksimalkan fungsi mereka atau pencapaian tujuan walaupun dihadapkan pada kendala atau tekanan. Artinya, sebelum membuat keputusan, individu telah menetapkan tujuan

Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa.

¹⁴ Pollack, M. A. , *Rational Choice and EU Politics. Handbook Of European Union Politics*, hal. 32.

¹⁵ Mochtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: PT PustakaLP3ES.

yang diinginkan kemudian mencari dan menyusun tindakan-tindakan alternatif yang maksimal untuk tetap mencapai tujuan itu. Kepentingan Nasional suatu negara biasanya konsepsi yang sangat umum dari elemen-elemen yang merupakan kebutuhan paling vital negara. Ini termasuk perlindungan diri, kemerdekaan, integritas wilayah, keamanan militer dan kesejahteraan ekonomi. Karena tidak ada satu "Kepentingan" yang mendominasi fungsi pembuatan kebijakan dari pemerintah, konsep mungkin lebih tepat disebut, dalam bentuk jamak, sebagai kepentingan nasional¹⁶. Tentu dalam hal ini berhubungan dengan nasional Perancis, bagaimana Sarkozy menyusun tindakan-tindakan untuk mempertahankan kepentingan nasional nya, baik itu misal dalam hal keamanan dan ekonomi mereka yang akan terpengaruh dengan adanya imigran dari etnis Roma ini. Kepentingan nasional merupakan tujuan akhir dari sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan merupakan target utama yang harus dicapai oleh negara tersebut. Dengan kata lain, kepentingan nasional juga dapat diartikan sebagai kebutuhan negara yang bersifat penting yang kemudian mengarahkan para pembuat keputusan dalam merumuskan kebijakan luar negerinya¹⁷.

Ketiga dan terakhir, *the existence of various institutional* atau *strategic constraints on individual choice*. Hal ini berarti individu tidak langsung memutuskan sesuatu tetapi mencoba menimbang dan memilih dahulu tindakan alternatif yang ada, dengan mempertimbangkan keterbatasan lingkungan fisik dan sosial mereka. Dalam pengambilan keputusan, tentu sebagai kepala Negara Sarkozy mempertimbangkan beberapa aspek untuk menimbang keuntungan maupun kerugian yang akan didapat baik itu dalam keputusan tetap mempertahankan

¹⁶ Jack C. Plano, & Roy Olton, *The International Relation Dictionary*. Holt Rinchat and Winston Inc.

¹⁷ Anak A.Perwita, & Yanyan Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

imigran maupun kebijakan untuk mendeportasi para imigran etnis Roma tersebut.

D. Hipotesa

Dari permasalahan yang ada dengan didukung dengan landasan teori yang digunakan, penulis membuat sebuah hipotesa:

Walaupun diprotes oleh Uni Eropa sebagai organisasi yang menaungi negara-negara di Uni Eropa, Perancis tetap mengeluarkan kebijakan deportasi tersebut karena:

- Migrasi etnis Roma ke Perancis menimbulkan ancaman keamanan bagi Perancis.
- Pemerintah Perancis percaya bahwa dengan mengeluarkan kebijakan deportasi kepada etnis Roma akan menguntungkan Perancis.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui alasan dibalik mengapa Perancis tidak menghiraukan kecaman dari Uni Eropa dan tetap melanjutkan pendeportasian terhadap etnis roma.

F. Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi kepada Perancis sebagai Negara yang mengeluarkan kebijakan deportasi Etnis Roma dan Uni Eropa sebagai organisasi yang menaungi negara-negara di Eropa. Batasan waktu ada pada tahun 2010 dimana pada pertengahan dan akhir tahun pendeportasian tersebut terjadi.

G. Metode Penelitian

Berdasarkan ciri atau masalah yang ingin dipecahkan dalam penelitian ini, maka metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan, yaitu untuk menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda dan metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman

pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Kajian literature yang digunakan dalam penelitian ini mengedepankan penggunaan buku-buku yang relevan dengan penelitian sebagai bahan pengkajian. Selain buku, sumber lain juga digunakan diantaranya adalah artikel, jurnal, laporan, artikel internet untuk menunjang penelitian.

H. Sistematika Penulisan

BAB I

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, tujuan penelitian, batasan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II

Membahas mengenai hukum migrasi Perancis, lalu latar belakang dari etnis roma dan migrasi etnis Roma ke Perancis.

BAB III

Membahas tentang campur tangan Uni Eropa dan kasus yang dibuat oleh etnis Roma sehingga mengancam keamanan Perancis.

BAB IV

Menjelaskan elemen pilihan rasional.

BAB V

Berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis terhadap kebijakan deportasi pemerintah Perancis terhadap etnis Roma.